



Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing untuk Guru Bahasa Indonesia di Prancis

Dadang Sunendar¹, Tri Indri Hardini², Neidya Fahma Sunendar³

^{1,2,3}. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Kata Kunci:

Internasionalisasi,
Bahasa Indonesia, BIPA,
Pelatihan

Keywords:

Internationalization,
Indonesian Language,
BIPA, Training

Article History

Received Sept, 05, 2025

Accepted Apr, 07, 2026

Empowerment

Jurnal Pengabdian pada
Masyarakat



This work is

licensed under a

Creative Commons 4.0

International License

Attribution-ShareAlike



Abstrak

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki peran strategis sebagai identitas nasional dan instrumen diplomasi global. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, internasionalisasi bahasa Indonesia dilakukan melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, tindakan, dan refleksi bersama pengajar BIPA di Prancis dalam pelatihan pada 17–18 Juli 2025 di KBRI Prancis. Hasil menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kekuatan dari aspek regulasi, sejarah, dan jumlah penutur, serta peluang besar menjadi bahasa internasional. Namun, masih terdapat kelemahan, seperti rendahnya pemahaman ideologis masyarakat dan keterbatasan kosakata. Implementasi politik bahasa juga menghadapi tantangan di ruang publik. Strategi pengembangan BIPA menekankan pelatihan berkelanjutan, penguatan bahan ajar, riset, dan kolaborasi lintas lembaga. Pendekatan PAR terbukti efektif menghasilkan solusi kontekstual dan berkelanjutan.

Abstract

As the national language, Indonesian plays a strategic role as a national identity and an instrument of global diplomacy. In line with Law Number 24 of 2009, the internationalization of Indonesian is carried out through the Indonesian Language for Foreign Speakers (BIPA) program. This research aims to analyze the position of Indonesian, language politics and planning, and BIPA development strategies through a Participatory Action Research (PAR) approach. The PAR method was implemented through planning, action, and reflection with BIPA teachers in France during a training session held on July 17–18, 2025, at the Indonesian Embassy in France. The results indicate that Indonesian has strengths in terms of regulations, history, and number of speakers, as well as significant potential to become an international language. However, weaknesses remain, such as low public ideological understanding and limited vocabulary. The implementation of language policy also faces challenges in the public sphere. The BIPA development strategy emphasizes ongoing training, strengthening teaching materials, research, and cross-institutional collaboration. The PAR approach has proven effective in producing contextual and sustainable solutions.

Bandung, Jawa Barat 40154

@ 2025 The Author (s). Published by LP2M STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB. This is an Open Access article distributed under the terms of the <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to Cite : Sunendar, Dadang, Tri Indri Hardini, and Neidya Fahma Sunendar. "Pelatihan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing Untuk Guru Bahasa Indonesia Di Prancis". *Empowerment: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 6, no. 1 (April 30, 2026): 1-8. Accessed April 30, 2026. <https://journal.staidk.ac.id/index.php/pkm/article/view/1276>.

Pendahuluan

Pada umumnya, kemajuan suatu bangsa sering diukur melalui parameter kemampuan ekonomi, pertahanan, infrastruktur, dan bidang lainnya yang mudah dilihat, dikenali, serta dirasakan. Namun demikian, bahasa juga merupakan bagian dari infrastruktur lunak yang digunakan oleh seluruh warga negara. Setiap bangsa memiliki bahasa negaranya masing-masing dengan latar belakang sejarah yang berbeda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, kemandirian, serta daya saing di tingkat global.

Upaya penguatan peran bahasa Indonesia secara formal ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (RI, 2009), yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (RI, 2014). Regulasi tersebut menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga menuju ranah internasional. Internasionalisasi bahasa Indonesia perlu dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan pembinaan kepada masyarakat Indonesia agar mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menjunjung tinggi martabatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 44, disebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap dan berkelanjutan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh lembaga kebahasaan serta diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian, peningkatan fungsi bahasa Indonesia secara implisit mengarah pada upaya menjadikannya sebagai salah satu bahasa internasional. Dalam konteks global, saat ini terdapat enam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Spanyol, Arab, dan Rusia.

Kebijakan internasionalisasi bahasa Indonesia tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, antara lain mengenai kesiapan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional, jumlah kosakata yang dimiliki, serta kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan perlunya kajian terhadap kekuatan

bahasa Indonesia dari berbagai aspek.

Secara formal tidak terdapat kriteria baku mengenai syarat suatu bahasa menjadi bahasa internasional. Namun, berdasarkan kajian terhadap bahasa-bahasa resmi PBB, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, yaitu: (1) memiliki jumlah penutur yang besar; (2) digunakan di lebih dari satu negara; (3) mudah dipahami; (4) bersifat eufonik dan mudah dituliskan; serta (5) memiliki kosakata yang memadai sebagai bahasa ilmu pengetahuan.

Berdasarkan indikator tersebut, bahasa Indonesia pada dasarnya telah memenuhi sebagian besar kriteria. Dari segi jumlah penutur, bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk Indonesia, dan jika ditambah dengan penutur di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, Timor Leste, dan Filipina Selatan, jumlahnya dapat mencapai lebih dari 300 juta penutur. Dari segi persebaran, bahasa Indonesia juga digunakan di berbagai negara dengan variasi dialek yang memiliki kedekatan dengan bahasa Melayu sebagai akar historisnya.

Selain itu, bahasa Indonesia relatif mudah dipahami karena menggunakan aksara Latin yang umum digunakan di berbagai negara. Dari segi fonologi, bahasa Indonesia juga tergolong eufonik, dengan sistem pelafalan yang konsisten antara tulisan dan bunyi sehingga memudahkan pembelajar asing. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya penutur asing yang mampu mempelajari bahasa Indonesia. Dari aspek kosakata, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V (daring), berdasarkan data tanggal 18 Oktober 2024, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 120.688 entri total dan 149.276 makna total. Dari angka entri di atas makna per entrinya 1,162 dan contoh makna dalam KBBI baru sebesar 0,226 (Sunendar, 2024, artikel Kompas). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, jumlah kosakata tersebut akan bertambah tiga kali lipat, karena jumlah kosakata bidang ilmu lebih dari 400 ribu kosakata

Meskipun demikian, terdapat satu aspek yang masih menjadi tantangan utama, yaitu sikap masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Sikap kurang bangga, kurang menghargai, dan rendahnya kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia masih menjadi kendala dalam upaya penguatan fungsi bahasa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan untuk menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan bangsa..

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang menekankan keterlibatan aktif mitra dalam setiap tahapan kegiatan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan refleksi secara berkelanjutan (Chevalier & Buckles, 2019). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan adanya kolaborasi antara tim pengabdian dan mitra, dalam hal ini pengajar BIPA di wilayah Prancis, untuk bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan, melaksanakan solusi, serta mengevaluasi hasil kegiatan.

Tahap perencanaan diawali dengan komunikasi dan koordinasi antara tim pengabdian dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Prancis. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan mitra terkait penguatan kapasitas pengajar BIPA, sekaligus penyusunan desain pelatihan yang sesuai dengan konteks pembelajaran BIPA di luar negeri. Komitmen kerja sama antara kedua pihak menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Tahap pelaksanaan tindakan diwujudkan dalam bentuk pelatihan bagi pengajar BIPA di wilayah Prancis. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Juli 2025, bertempat di ruang pertemuan KBRI Prancis. Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. dan Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd., dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan sebagai moderator. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis dan Andora, Bapak Ramadansyah Hasan. Dalam tahap ini, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan berbagi pengalaman terkait praktik pembelajaran BIPA.

Tahap refleksi dan evaluasi dilakukan secara partisipatif bersama peserta pelatihan untuk menilai efektivitas kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan tindak lanjut yang diperlukan. Refleksi ini menjadi bagian penting dalam siklus PAR untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kompetensi pengajar BIPA.

Hasil dan Pembahasan

Posisi Bahasa Indonesia

Dalam kerangka Participatory Action Research (PAR), analisis posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tidak hanya dipahami sebagai kajian konseptual, tetapi juga sebagai hasil refleksi bersama antara tim pengabdian dan mitra (pengajar BIPA di Prancis) yang terlibat dalam proses identifikasi, diskusi, dan evaluasi.

Berdasarkan hasil refleksi partisipatif yang dilakukan selama kegiatan pelatihan, analisis SWOT terhadap posisi bahasa Indonesia menghasilkan beberapa temuan berikut.

Kekuatan (*Strengths*) bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terkonfirmasi melalui diskusi bersama peserta, terutama terkait kokohnya landasan hukum yang mengatur kedudukannya, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan turunan lainnya. Dalam forum pelatihan, para pengajar BIPA juga menegaskan bahwa kebijakan bahasa di bidang pendidikan—yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan bahasa negara.

Selain itu, refleksi bersama menunjukkan bahwa Sumpah Pemuda 1928 tetap menjadi fondasi ideologis yang kuat dalam penerimaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Para peserta pelatihan mengamati bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, berdampingan dengan bahasa daerah, memperlihatkan tingkat penerimaan yang tinggi tanpa resistensi. Keberagaman 718 bahasa daerah juga dipahami sebagai kekuatan yang memperkaya identitas nasional dalam bingkai kebinekaan.

Dalam diskusi partisipatif, peserta juga menyoroti bahwa tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap bahasa asing justru dapat menjadi kekuatan tambahan, karena penguasaan multilingual (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing) berpotensi meningkatkan daya saing global.

Kelemahan (*Weaknesses*) diidentifikasi secara kolektif melalui pengalaman praktis para pengajar BIPA. Salah satu isu utama yang muncul adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi strategis bahasa Indonesia

sebagai simbol negara, bukan sekadar alat komunikasi. Refleksi peserta menunjukkan bahwa dimensi ideologis bahasa (jati diri, kebanggaan nasional, dan pemersatu bangsa) belum sepenuhnya terinternalisasi.

Dari sisi pengembangan bahasa, peserta juga menyoroti keterbatasan jumlah lema bahasa Indonesia dibandingkan bahasa global seperti bahasa Inggris. Hal ini dipandang sebagai tantangan yang perlu diatasi melalui pengayaan kosakata, baik dari bahasa daerah maupun melalui pepadanan istilah asing.

Selain itu, dalam diskusi reflektif juga muncul perhatian terhadap perlindungan bahasa daerah yang masih memerlukan penguatan, terutama di wilayah dengan keragaman bahasa tinggi. Penguasaan bahasa asing yang masih terfokus pada bahasa Inggris juga diidentifikasi sebagai keterbatasan dalam menghadapi dinamika global yang lebih luas.

Peluang (*Opportunities*) perkembangan bahasa Indonesia juga menjadi bagian penting dari refleksi bersama. Peserta pelatihan memandang bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional, mengingat usianya yang relatif muda namun memiliki sistem yang berkembang dan jumlah penutur yang besar.

Hasil refleksi partisipatif ini sejalan dengan pandangan bahwa kekuatan dan peluang bahasa Indonesia sangat besar, meskipun upaya pembinaan dan pemasyarakatan masih perlu ditingkatkan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Politik dan Perencanaan Bahasa di Indonesia

Melalui proses diskusi dan refleksi selama pelatihan, peserta memahami bahwa politik bahasa Indonesia menetapkan tiga ranah utama: bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Tidak adanya resistensi terhadap pembagian ranah ini dipandang sebagai indikator keberhasilan kebijakan bahasa. Namun, peserta juga mengidentifikasi tantangan nyata, terutama meningkatnya dominasi bahasa asing di ruang publik.

Dalam konteks pengembangan bahasa, refleksi bersama menegaskan bahwa berbagai upaya seperti pengayaan kosakata, pembakuan kaidah, penyusunan bahan ajar, dan pengembangan instrumen uji kemahiran telah dilakukan secara sistematis. Peserta juga mengapresiasi kemajuan teknologi, seperti hadirnya KBBI daring dan luring, yang mempermudah akses masyarakat terhadap informasi kebahasaan serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengembangan bahasa.

Namun demikian, dalam sesi refleksi, peserta juga mengkritisi implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang dinilai belum sepenuhnya efektif dalam membangun sikap bangga berbahasa Indonesia, terutama di ruang publik. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik yang perlu ditindaklanjuti melalui strategi pembinaan yang lebih partisipatif.

Dalam diskusi lanjutan, peserta juga menekankan bahwa pembinaan bahasa—melalui pendidikan formal, penyuluhan, dan program pelatihan—harus mampu menghasilkan perubahan nyata yang tercermin dalam penggunaan bahasa di ruang publik.

Diplomasi bahasa melalui program BIPA juga dipahami sebagai bagian integral dari politik bahasa nasional. Dalam konteks ini, pengalaman langsung para pengajar BIPA di luar negeri memberikan perspektif penting bahwa internasionalisasi bahasa Indonesia harus berjalan paralel dengan penguatan sikap berbahasa di dalam negeri.

Refleksi partisipatif juga menyoroti pentingnya perencanaan bahasa yang komprehensif, sebagaimana dikemukakan oleh Kaplan dan Baldauf Jr. (1997), yang mencakup aspek kebijakan, praktik, dan perubahan sosial. Peserta melihat bahwa

pengembangan bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan literasi masyarakat, karena bahasa merupakan fondasi utama literasi.

Selain itu, diskusi juga menegaskan pentingnya perlindungan bahasa daerah sebagai bagian dari kebinekaan, serta perlunya perencanaan yang lebih matang dalam pengajaran bahasa asing, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Strategi Pengembangan BIPA

Beberapa strategi yang dihasilkan dan dikonfirmasi dalam proses partisipatif meliputi:

1. penguatan pengajaran BIPA di perguruan tinggi sebagai program utama,
2. pelatihan berkelanjutan bagi pengajar BIPA,
3. pengembangan bahan ajar cetak dan digital,
4. penguatan pusat kajian BIPA,
5. pengiriman pengajar ke luar negeri melalui kerja sama dengan KBRI,
6. peningkatan riset kebahasaan,
7. penyelenggaraan forum ilmiah secara berkala,
8. penguatan regulasi kebahasaan bagi penutur asing,
9. serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Dalam diskusi reflektif, peserta menekankan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kolaborasi antarpemangku kepentingan dan keberlanjutan program.

Lini Masa Internasionalisasi BIPA

Penyusunan lini masa internasionalisasi bahasa Indonesia tidak hanya dilihat sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai hasil refleksi kolektif yang perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika global.

Lini Masa Penginternasionalan Bahasa Indonesia



Gambar 1: Lini Masa Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Peserta pelatihan memandang bahwa target internasionalisasi bahasa Indonesia hingga tahun 2045 merupakan visi strategis yang realistis, namun

memerlukan komitmen berkelanjutan, evaluasi berkala, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengajar BIPA di luar negeri.

Kesimpulan

Merujuk kajian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Orang Asing (BIPA) memiliki dasar hukum yang sangat kuat, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai peraturan turunan lainnya. Dari evaluasi kinerja program internasionalisasi BIPA, masih ditemukan kelemahan koordinasi dan sosialisasi program antar instansi pemerintah Indonesia, maupun pihak KBRI yang menjadi ujung tombak pelaksana program.

Program-program pelatihan bagi para pengajar BIPA di luar negeri perlu diperbanyak melalui kerja sama dengan para Atase Pendidikan dan Kebudayaan, para pegiat BIPA di Pensosbud KBRI, para konsul Jenderal, maupun diaspora Indonesia yang memiliki minat menjadi pengajar BIPA di negara terkait. Pelatihan pengajar BIPA juga untuk memperbanyak pengajar BIPA profesional dan bersertifikat yang dapat dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kerja sama UPI dengan pihak kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Paris, menjadi salah satu model kerja sama pelatihan pengajar BIPA yang dapat dipertimbangkan

Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2018). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2019). Bahasa dan hukum. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/bahar>
- BIPA Kemdikbud. (n.d.-a). Beranda. <https://bipa.kemdikbud.go.id/portal>
- BIPA Kemdikbud. (n.d.-b). Portal BIPA. <https://bipa.kemdikbud.go.id/portal>
- Fals-Borda, O. (1987). The Application of Participatory Action-Research in Latin America. *International Sociology*, 2(4), 329-347. <https://doi.org/10.1177/026858098700200401> (Original work published 1987).
- Ferguson, G. (2006). *Language planning and education*. Edinburgh University Press.
- Hardini, T. I. (2015). A cross-cultural analysis of transnational marriage: Franco-Indonesian marriage case. In *Proceedings of the International Conference on Social Science and Education (ICSE-15)*. Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icse-15/25852510>
- Hardini, T. I. (2019). Indonesian language assistant program in Australian schools: Recruitment and selection process. [Artikel/Prosiding].
- Jurnal Cakrawala Pendidikan. (2018). [Artikel]. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/25083>
- Kaplan, R. B., & Baldauf, R. B., Jr. (1997). *Language planning: From practice to theory*. Multilingual Matters.
- Kismiatiun, A. (2018). *Mengenal BIPA: Bahasa Indonesia bagi penutur asing dan*

- pembelajarannya. UNY Press.
- Muliastuti, L. (2018). Bahasa Indonesia bagi penutur asing: Acuan teori dan pendekatan pengajaran. Yayasan Obor Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia.
- Sunendar, D. (2018). Politik dan perencanaan bahasa dan sastra. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (Kongres Bahasa Indonesia XI).
- Sunendar, D. (2020). Strategi optimalisasi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan, serta penguasaan bahasa asing [Makalah seminar]. HPISJ.
- Sunendar, D. (2024, Oktober 28). Refleksi Sumpah Pemuda ke-96: Mampukah bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan? Kompas.